
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA (HESB) DI INDONESIA

ERLINA B

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Abstract

This study discussed the influence of globalization toward the development of human rights in economic, social and culture in Indonesia. The influence of globalization in Indonesia is very strong, there is shift of values and norms which underlie and control human rights in several different countries, because the limit of those values began to disappear, there are values which survive and there are values which shift. The right solution is to build law based on Pancasila values in legislation organic and to implement Pancasila in the state and nation's life correctly.

Keyword: Globalization, Human Rights

I. PENDAHULUAN

Globalisasi menyebabkan kencangnya perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, seiring dengan kemajuan yang telah dicapai melalui teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia dalam posisi *borderless* (sebuah dunia tanpa batas atau sekat). Globalisasi menciptakan dunia tanpa sekat pembatas, menerobos dan meniadakan aspek geografis, menyatukan belahan dunia dalam satu ruang. Akibat globalisasi memberikan pengaruh yang luar biasa bagi dinamika kehidupan masyarakatnya, baik bidang ekonomi, politik, sosial, pertahanan keamanan, budaya, tidak terkecuali dalam pengaturan tatanan nilai (hukum) yang diberlakukan untuk mewujudkan rasa tertib dalam masyarakat, dan tidak terbantahkan adanya pengaruh dari kondisi keterbukaan dalam tatanan dunia.

Dunia tanpa batas inilah yang disebut globalisasi, dan globalisasi ini akhirnya menjadi kata kunci yang menjadi pemicu, sehingga norma-norma diberlakukan terpengaruh oleh kekuatan dan cengkeraman globalisasi, tak pelak bahwa pengaturan tatanan nilai (hukum) pun tak mengalami sekat, batas nilai-nilai dari negara barat dan timur semakin sedikit, yang secara nyata kekuatan nilai-nilai dari negara barat mulai menggeser bahkan merobohkan nilai-nilai negara timur.

Globalisasi antara bangsa dan antar negara tidak mungkin dihindarkan lagi, bagi negara maju, ekspansi usahanya ke negara lain, khususnya negara berkembang sudah merupakan syarat mutlak terkait dengan persaingan yang demikian ketat di negara mereka sendiri atau dalam kelompok negara - negara yang bersangkutan. Sementara itu negara berkembang yang kekurangan dalam modal dan keahlian sangat membutuhkan

kehadiran negara maju untuk menggarap kekayaan alam yang dimiliki sekaligus bermaksud untuk memperoleh transfer keahlian dan teknologi.

Globalisasi yang sedang berlangsung membawa pengaruh yang luar biasa, dalam kompleksitas global itu, kemampuan menjadi goyah dan terjadi dinamika baru dalam hubungan individu dan antar sistem masyarakat dunia, yang pada gilirannya menciptakan fenomena - fenomena baru yang mengubah kehidupan berjarak menjadi kehidupan yang bersatu. Inilah globalisasi, yang menghubungkan, mengangkat, mengkooptasi manusia ke dalam suatu pola kehidupan. Dalam proses ini sudah barang tentu dan tidak bisa dihindarkan terjadinya transformasi berbagai sistem nilai dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya.

Pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya sangat kuat, tantangan Indonesia di era globalisasi ini adalah potensi terjadinya pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya yang besar, baik karena kesengajaan (*crime by commission*), karena pembiaran (*crime by omission*), maupun karena dimediasi (*mediated crime*), tindakan sengaja bisa terjadi jika pemerintah dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi (otonomi daerah) secara sengaja membiarkan rakyatnya tidak memperoleh hak-hak dasarnya untuk hidup dan melangsungkan kehidupan sehingga tetap miskin, terbelakang, tidak sehat, dan tidak berpendidikan (Suparman Marzuki, 2010:466).

Tindakan pembiaran (*omission*) terjadi apabila pemerintah pusat dan daerah tidak mengambil tindakan atau diam atas suatu keadaan, padahal bisa melakukan tindakan tersebut. Pemerintah telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena pembiaran, penduduk yang menderita, kelaparan, gizi buruk, atau tidak berpendidikan, dan pemerintah diam atas itu;

lebih-lebih apabila negara (pemerintah) atau daerah (pemerintah daerah) melakukannya, maka pemerintah telah melakukan kejahatan atau kekerasan karena pembiaran (*crime/ violence by omission*) (Suparman Marzuki, 2010:467).

Kebalikan dari *violence by omission* atau *crime by omission* adalah *mediated violence* atau *mediated crime* (kekerasan atau kejahatan karena dimediasi) adalah hasil dari intervensi manusia atau pemerintah secara sengaja terhadap lingkungan alam atau sosial yang membawa pengaruh secara tidak langsung pada manusia lain. Pengaruhnya tidak langsung akan segera dirasakan, eksploitasi alam, penebangan hutan secara liar misalnya adalah jenis tindakan *mediated crime* (Jamil Salmi, 2005:5) yang dalam rentang waktu tertentu mendatangkan bahaya banjir, tanah longsor dan dan bahaya-bahaya bencana alam lainnya.

Era globalisasi yang dapat menimbulkan permasalahan pelanggaran-pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya di atas tentu akan menghambat tujuan negara, dalam bidang hukum perlu pengaturan yang lebih tepat mengenai hak asasi manusia ekonomi, sosial dan budaya melalui pembangunan hukum hak asasi manusia yang lebih arif dan bijaksana. Kajian ini memfokuskan pada pengaruh dan solusi pembangunan hukum atau politik hukum Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB) di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap perkembangan Hak Asasi Manusia bidang ekonomi, sosial, budaya di Indonesia ?
2. Bagaimana konstruksi hukum Hak Asasi Manusia bidang ekonomi, sosial, dan budaya (HESB) di Indonesia era globalisasi ?

II. PEMBAHASAN

Sistem Globalisasi

Globalisasi telah meruntuhkan batas-batas negara bangsa, yang oleh Kenichi Ohmae disebut sebagai "*The End of the Nation State*", sehingga implikasinya dunia menjadi tanpa batas (*borderless world*) (Kenichi Ohmae, 1995:1-5). Dalam bahasa David M. Trubek mengatakan bahwa dalam restrukturisasi global dan nasional terdapat interpenetrasi dan inter relasi. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan baik ideologi, politik, budaya, sosial, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan suatu negara selalu dan tengah terpenetrasi oleh kekuatan - kekuatan ekstranasional sekaligus sebagai faktor mendinamisasi kawasan tersebut (David M. Trubek, et.all, 1993:3).

Secara lebih tegas yang dimaksud dengan globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan perdagangan bebas, yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme. Para teoretisi kritis sejak lama sudah meramalkan perkembangan kapitalisme akan berkembang menuju pada dominasi ekonomi, politik, dan budaya berskala global setelah perjalanan panjang melalui era kolonialisme.

Menurut Barbara Parker bahwa globalisasi merupakan "*there is growing sense that event occurring through out the world are converging rapidly to shape a single, integrated world where economics, social, cultural, technological, business, other influences cross traditional border and boundaries such as nation, national cultures, time, spaces, and business industries with increasing ease*" (Barbara Parker, 1997:484). Globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lainnya atau

saling terhubungkan semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan.

Globalisasi ekonomi pada masa itu lahir dengan kekerasan dalam alam kolonialisme. Pada masa kini globalisasi ekonomi berkembang dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian - perjanjian menyebar melewati batas - batas negara Globalisasi hukum tersebut dapat terjadi melalui perjanjian dan konvensi internasional, perjanjian privat, dan institusi ekonomi baru. Globalisasi hukum tersebut kemudian diikuti pula oleh globalisasi praktik hukum, dimana antara lain konsultan hukum suatu negara dan suatu sistem hukum, dapat bekerja dinegara lain yang mempunyai sistem hukum yang berbeda (Martin Khor, 2005:11-12).

Globalisasi secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Namun, jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoretis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan 'pertumbuhan' ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, namun sesungguhnya globalisasi adalah kelanjutan dari kolonialisme dan *developmentalism* sebelumnya. Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini, sejak awal oleh kalangan ilmu sosial kritis dan yang memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang adil serta kalangan yang melakukan pemihakan

terhadap yang lemah, telah mencurigainya sebagai bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme.

Dalam pandangan Scholte, bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan dengan globalisasi (<http://www.wikipedia.com/globalisasi/html>, diunduh 1 Agustus 2011), yaitu

- a. *Internasionalisasi*: globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain;
- b. *Liberalisasi*: globalisasi juga diartikan dengan semakin diturunkannya batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi;
- c. *Universalisasi*: globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebarunya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia;
- d. *Westernisasi*: westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal; dan
- e. *Hubungan transplanetari dan supranasionalitas*: Arti yang kelima ini berbeda dengan keempat definisi di atas. Pada empat definisi pertama, masing-masing negara masih mempertahankan status ontologinya. Pada pengertian yang kelima, dunia global memiliki status ontologi sendiri, bukan sekadar gabungan negara-negara.

Dalam pemahaman Cochrane dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu: *Pertama*, Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di

seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara - negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut; (1) Para globalis positif dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab; (2) Para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Serikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (anti globalisasi);

Kedua, para tradisional tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau, jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan, atau evolusi, dari produksi dan perdagangan kapital.

Ketiga, Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisional. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat di lebih - lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai "seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung". Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif.

Terdapat dua ciri utama globalisasi (Martin Khor, 2005:11-12):

- a. Peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan transnasional maupun oleh perusahaan-perusahaan dan dana global. Jika dulu sebuah perusahaan multinasional hanya mendominasi sebuah produk, maka saat ini sebuah perusahaan transnasional yang besar secara khusus memproduksi dan menjual berbagai macam produk, pelayanan, dan bidang-bidang yang makin beragam. Bahkan di prediksi jika perusahaan transnasional ini semakin beragam produk yang dihasilkan tergantung pada permintaan pasar di negara tempat perusahaan beroperasi;
- b. Dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan nasional (baik bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi) yang sekarang ini berada dalam yurisdiksi suatu pemerintahan dan masyarakat dalam suatu wilayah negara bangsa bergeser di bawah pengaruh atau di proses badan - badan internasional atau perusahaan besar serta pelaku ekonomi dan keuangan internasional.

Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya (HESB)

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hendarmin Ranadireksa menyebutkan bahwa hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat

ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah (Suwandi, 2005:39).

Menurut Mahfud MD (2001) hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut di bawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau penguasa/ negara yang wajib dilindungi tanpa alasan apapun.

Pada tahun 1948, tepatnya tanggal 10 Desember 1948 terbentuk suatu kesepakatan umum dari masyarakat internasional untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia. Kesepakatan umum itu adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau disebut juga *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang memuat pasal - pasal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan pada tahun 1966 disepakati pula instrumen hukum internasional menyangkut Hak Asasi Manusia, yakni: Internasional Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights*), Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*the International on Economic, Social and Cultural Rights*), dan Protokol Tambahan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (*the Optional Protocol on Civil and Political Rights*).

Hak ekonomi dan sosial itu merupakan hak asasi manusia yang sangat strategis untuk diperjuangkan dan dipenuhi, senada dalam pandangan ini dikemukakan oleh Robertson: *"Civil and Political Right may be fundamental, be they can not be enjoyed on an empty stomach, talk to holocaust survivors, and they will tell you that racial discrimination, slavery and loss of liberty were not the immediate concern....but rather an aching and all-enveloping hunger. Of course, starvation was inflicted as a consequences of an inhuman racist policy, but it endangered their right to life more directly than depriving them of civil liberties"* (Geofrey Robertson, 2000:157).

Pengaturan hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, misalnya hak pendidikan sebagai salah satu hak dasar manusia, selain hak pendidikan diatur juga hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memiliki keturunan, hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memilih pekerjaan, hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, hak bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, hak mendapatkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, hak atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dari pemerintah. Namun dalam dataran implementasi, hak ekonomi, sosial dan budaya masih belum maksimal.

Pengaruh Globalisasi Terhadap Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya (HESB) Di Indonesia

Globalisasi merupakan sebuah keadaan sebagai konsekuensi dari transformasi global yang menjadikan dunia dalam kondisi *compresed* serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dampak yang paling jelas muncul kepermukaan adalah pengaruh nilai liberalisasi yang begitu besar dalam muatan yang diatur melalui ketentuan hukum perundang-undangan, bahkan sering kali globalisasi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, padahal dalam konteks ke Indonesia bahwa hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan budaya harus mengacu dan merujuk pada Pancasila, faktanya hal ini ditandai dengan mudurnya implementasi nilai - nilai Pancasila dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum terkait hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan politik) (Endang Sutrisno, 2007:115).

Globalisasi merupakan kekuatan baru yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia, bahkan nilai - nilai kemanusiaan dalam tradisi ketimuran (termasuk Indonesia) semakin memudar, globalisasi membawa nilai - nilai liberalisme membuat nilai - nilai keilmuan bangsa Indonesia merasa tak punya jati diri lagi, sebut saja beberapa penormaan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan bidang ekonomi yang tidak mengindahkan lagi nilai-nilai Pancasila. Keberpihakan peraturan perundang-undangan pada nilai - nilai liberalisme tersebut dapat dipandang sebagai penyebab krisis multi dimensi, khususnya dalam pengembangan teori dan ilmu hukum, krisis yang berkaitan dengan hukum adalah melemahnya sendi-sendi nilai hukum budaya bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan tentunya nilai - nilai kearifan lokal.

Keadaan tersebut yang seharusnya dijadikan “cermin berbenah diri” penyelenggaraan hukum, dan setidaknya upaya yang dilakukan dalam merespon perubahan/ pergeseran nilai, sebab jika tidak dilakukan, maka hukum hanya sekedar “teks-teks mati” yang tidak dapat diimplementasikan dengan baik, hal ini jelas menjadi permasalahan bagi pembangunan hukum ekonomi di Indonesia di era globalisasi. Dalam bahasa Arnold Toynbee bahwa telah terjadi ketimpangan sangat besar antara sains dan teknologi yang melaju sedemikian pesat dengan kearifan moral bangsa yang sama sekali tidak berkembang atau kalau boleh dikatakan justru malah mengalami kemunduran (Anthon F. Susanto, 2010:1). Globalisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh David C.Korten telah menyebabkan peran politis pemerintah menjadi jauh berkurang, saat ini yang jauh lebih berkuasa adalah jaringan yang berpusat pada ekonomi global, yang didominasi oleh perdagangan antar perusahaan dan hubungan antar pribadi.

Pendapat David C. Korten tersebut ada benarnya mengingat industrialisasi teknologi informasi semakin mencengkeram, dan kondisi sosial masyarakat mengalami pergeseran dari komunalistik kearah individualistik, dimensi hak asasi manusia pun tak ubah sama telah mengalami pergeseran, selain itu pemerintah pusat dan daerah mulai berpihak pada globalisasi (investasi asing, perusahaan asing) dan mengacuhkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Seiring dengan itu peran pemerintah nasional dan daerah pun menjadi berubah dari semula sebagai pelindung rakyat dan basis sumber daya manusia alam mereka dari ancaman eksternal menjadi penjamin rakyat mereka harus dapat menikmati ragam pilihan yang luas diantara berbagai barang dan jasa terbaik dan termurah dari seluruh dunia, karenanya pemerintah yang terpaku menjalani

peran tradisionalnya sebagai penguasa tunggal ekonomi dipandang akan menghambat investasi dan memiskinkan rakyatnya sendiri, inilah gambaran *mediated violence* atau *mediated crime* (kekerasan atau kejahatan karena dimediasi).

Bagi Indonesia, sangat tidak mungkin melawan arus globalisasi yang tengah berlangsung secara akseleratif, hal ini disebabkan: 1) Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan yang disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi dan buruknya birokrasi investasi; 2) pada saat bersamaan setelah Indonesia meratifikasi WTO, maka peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi semakin tereduksi secara signifikan. Meski globalisasi, yang pada dasarnya merupakan proses perubahan yang sangat cepat di semua lini kehidupan dan munculnya kompetisi yang sangat kejam, telah menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat lemah, tetapi masih ada celah-celah yang dapat digunakan untuk memperkuat diri, yakni pemerintah Indonesia harus dapat membangun kekuatan internal yang dimilikinya.

Dalam pandangan Anis Ibrahim bahwa pemerintah Indonesia harus berupaya melakukan *barrier to entry* yang bisa diciptakan melalui: 1) membangun nasionalisme konsumen yang tinggi untuk mencintai produk dalam negeri; 2) mendorong dan memfasilitasi agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat menguasai teknologi; 3) memperkuat asosiasi-asosiasi ahli untuk melindungi kepentingan profesi; 4) memperkuat market ekonomi dalam negeri untuk memasarkan produk lokal; 5) melakukan pembaharuan hukum yang dapat memproteksi semua itu tanpa melanggar kesepakatan global yang sudah ditandatangani Indonesia (Anis Ibrahim, 2007:97-98). Dalam pandangan penulis, hal di atas penting untuk dilaksanakan agar pembangunan hukum hak asasi manusia

bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat terealisasi dengan baik, logika terbaliknya jika pemerintah Indonesia tidak mampu melaksanakan solusi sederhana di atas, tentu bukan hanya pembangunan hak asasi manusia saja yang terbengkalai, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dapat terlihat semakin bertambahnya kemiskinan, kelaparan, semakin rendahnya sumber daya manusia diakibatkan biaya pendidikan melangit, dan lainnya.

Solusi Melalui Pembangunan Hukum

Pembangunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) tentu tidak semudah yang dibayangkan, apalagi nuansa globalisasi yang berdimensi individual semakin mencengkeram dan mulai mereduksi komunalitas masyarakat Indonesia. Beberapa dekade dan bahkan sampai sekarang, masyarakat masih terlihat paling tidak ada yang masih menyandarkan hidupnya pada komunalitas (khususnya di Pulau Jawa), nuansa saling membantu dalam bidang ekonomi masih terlihat, sekalipun sudah mulai sedikit kabur akibat globalisasi yang semakin memaksa manusia semakin egois dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Komunalitas yang dulu sebagai sandaran dalam menjalin kehidupan bermasyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya seiring menghilang diterjang badai globalisasi. Tentunya hal ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin negara untuk mewujudkan kebutuhan dasar dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, dalam arti bahwa negara harus memenuhi hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan budaya secara baik dan terjamin.

Fakta di lapangan berkenaan dengan hak asasi manusia, lebih didominasi hak politik dan hak sipil, sementara hak ekonomi, sosial dan budaya yang berangkat dari pemenuhan kebutuhan sering diabaikan

oleh pemerintah dalam pelaksanaannya, lihat saja berbagai kasus busung lapar, kelaparan dan bertambahnya jumlah penduduk miskin di berbagai daerah di Indonesia. Fakta ini berbeda dengan Cina, Singapura, dan negara Timur Tengah adalah contoh negara yang tidak demokratis. Di sisi lain negara tersebut sangat memperhatikan hak ekonomi, sosial dan budaya, terutama hak ekonomi dan sosial. Dominasi pemenuhan *freedom of want* (hak-hak sipil dan politik) daripada *freedom from need* (hak-hak ekonomi dan sosial), merupakan konsekuensi negara demokratis yang menggunakan *freedom of want* dalam memperoleh *freedom from need*.

Deklarasi universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) sejak diadopsi tahun 1948 telah mengafirmasi penting dan fundamental terpenuhinya dua macam kebebasan bagi manusia, yaitu *freedom of want* (hak-hak sipil dan politik) dan *freedom from need* (hak-hak ekonomi dan sosial), sementara fakta di lapangan menunjukkan semenjak Perang Dunia ke II, lebih banyak orang meninggal akibat malnutrisi, kelaparan, wabah penyakit ketimbang gabungan jumlah keseluruhan korban perang yang terjadi dan korban berbagai rezim represif yang secara sistematis melanggar hak-hak sipil dan hak-hak politik warga demi mempertahankan kekuasaan.

Hak ekonomi dan sosial itu merupakan hak asasi manusia yang sangat strategis untuk diperjuangkan dan dipenuhi, senada dalam pandangan ini dikemukakan oleh Robertson: "*Civil and Political Right may be fundamental, be they can not be enjoyed on an empty stomach, talk to holocausts survivors, and they will tell you that racial discrimination, slavery and loss of liberty were not the immediate concern....but rather an aching and allenveloping hunger. Of course, starvation was inflicted as a consequences of an*

in human racist policy, but it endangered their right to life more directly than depriving them of civil liberties" (Geoffrey Robertson, 2000:157).

Pembangunan hukum hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya merupakan jaminan keberlangsungan hidup umat manusia, tanpa itu sejatinya negara dan bangsa ini sudah kehilangan "core value" dalam kehidupan bernegara, bukan sistem hukum atau politik yang terpuaskan, tetapi pencapaian kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh anak bangsa dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sebuah tujuan mulia pendirian bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Berkaitan dengan pembangunan hukum hak asasi manusia (HESB), tentu harus melihat penormaan hukum yang besarnya tekanan terhadap hukum yang lahir di luar energi hukum dalam berbagai pembangunan hukum di Indonesia akibat era globalisasi yang semakin menggerogoti sistem hukum Indonesia, misalnya energi ekonomi, individualisasi, dan liberalisasi.

Kondisi tersebut harus mengacu pada argumen bahwa hukum harus berdiri di atas sub-sub sistem termasuk sub sistem ekonomi, Esmi Warrasih menyebutnya sebagai "supremasi hukum", jadi yang lebih disupremasikan (diutamakan/ diunggulkan) adalah tatanan hukum yang telah disepakati bersama, karena dalam kehidupan bermasyarakat "hukum" adalah kesepakatan bersama, terlebih kesepakatan bersama tersebut menjadi dasar legitimasi hukum, tidak mudah menetapkan legitimasi dan supremasi hukum apabila didasarkan pada pandangan individual atau kelompok yang berbeda-beda.

Dalam pembangunan hukum Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, maka Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu, posisi ini mengharuskan pembentukan hukum hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan

budaya adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006:23). Hal ini idealnya dilakukan dengan melakukan konkritisasi nilai-nilai Pancasila dalam penormaan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan budaya, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa sering mengalami pasang surut perkembangan, tetapi hal ini perlu diingat bahwa pasang surut tersebut bukan disebabkan kelemahan nilai-nilai Pancasila, tetapi lebih mengarah pada konsistensi implementasi nilai - nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, termasuk dalam menata kehidupan perekonomian bangsa dan negara (Endang Sutrisno, , 2007:96).

Perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik lainnya di era globalisasi akan lebih berat, sebab dalam penetrasi ekonomi global, maka tidak bisa dihindarkan adanya upaya menanamkan pengaruh ideologi dari suatu negara kepada negara lainnya, tentunya dalam konteks pembangunan hukum hak asasi manusia harus berpedoman teguh pada Pancasila, sebab Pembangunan hukum sudah sewajarnya didudukkan kembali pada tataran filosofisnya yang luhur (M.Arif Nasution, 1999:68-69).

Pancasila secara utuh harus dilihat sebagai suatu "*national guidelines*", sebagai "*national standart, norm and principles* yang sekaligus memuat "*human rights and human responsibility*" (Gunawan Muhammad dan Muamar Romadhan (ed), 2006:102). Pancasila juga dapat berfungsi sebagai *margin of appreciation* sebagai batas atau garis tepi penghargaan terhadap

hukum yang menyebar sebagai dampak globalisasi. Dalam pandangan Muladi bahwa karakter ilmu hukum harus mampu mendayagunakan Pancasila sebagai paradigma dan *margin of appreciation* bahwa dalam pembangunan hukum hak ekonomi, sosial, dan budaya harus bertumpu pada etika universal yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila, (Gunawan Muhammad dan Muamar Romadhan (ed), 2006:102), yaitu:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha esa yang menghormati ketertiban hidup beragama, rasa keagamaan, dan agama sebagai kepentingan besar;
- b. Menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia baik hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati "*the rights to development*".
- c. Harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep "*civic nationalism*" yang mengapresiasi pluralisme;
- d. Harus menghormati indek atau "*core value of democracy*" sebagai alat "*audit democracy*";
- e. Harus menempatkan "*legal justice*" dalam kerangka "*social justice*" dan dalam hubungan antar bangsa berupa prinsip-prinsip "*global justice*".

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menggambarkan gagasan Hans Kelsen tentang *Reine Rechtslehre, Groundnorm, Unsprungnorm* (Anthon F. Susanto, 2010:294). Sehingga melalui pembangunan hukum yang berdasarkan Pancasila terdapat harapan politik hukum nasional untuk merubah konstruksi yang selama ini dilakukan dengan tidak memasukan Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan budaya, dalam arti bahwa kedepan pembangunan hukum nasional harus

berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan arah kebijakan ini diharapkan politik hukumnya mampu mendukung tujuan berbangsa dan bernegara dalam transformasi skala global, internasional, nasional, regional.

Ikhtiar untuk menterjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam produk-produk hukum yang mengatur hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan budaya harus diramu sedemikian rupa agar hak-hak tersebut dapat terwujud, dan tentunya ketentuan normatif peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada konstitusionalisme Indonesia yang berpatokan pada Undang-undang Dasar 1945 harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan hukum hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan budaya secara tepat. Intinya pembangunan hukum hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka mewujudkan terjaminnya hak asasi manusia di era globalisasi harus berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam Undang-undang Dasar, telah diakomodir secara baik dalam Pasal 28 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya dalam kategori *freedom from need* harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 diatur beberapa hak ekonomi, sosial dan budaya, misalnya hak pendidikan sebagai salah satu hak dasar manusia, selain hak pendidikan diatur juga hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memiliki keturunan, hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memilih pekerjaan,

hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, hak bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, hak mendapatkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, hak atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dari pemerintah.

Dalam pandangan Suparman Marzuki (2010:466) urgensi pemenuhan dan perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mencakup tiga hal, yaitu: *Pertama*, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami manusia sehari-hari: makanan yang cukup, pelayanan kesehatan yang baik, dan perumahan yang merupakan kebutuhan pokok (*basic necessities*) bagi seluruh umat manusia. Realitasnya banyak manusia di seluruh penjuru dunia yang tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan pokok mereka, jangankan mempengaruhi kebijakan penguasa tentang survival mereka sehari-hari.

Perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya membutuhkan pemerintah dan aktor-aktor non negara yang berpengaruh lainnya untuk memastikan masyarakat mempunyai akses pada kebutuhan pokok bahan pangan, layanan kesehatan dan perumahan, dan memastikan mekanisme demokratik dimana masyarakat bisa menyampaikan pendapat pada pembuatan atau terhadap kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka yang juga dibutuhkan adalah sistem hukum yang memungkinkan aparat negara mempertanggungjawabkan

kebijakan pembangunan beserta prioritasnya kepada konstituen mereka, yaitu masyarakat. Hal ini berarti termasuk melakukan *review* terhadap legislasi dan praktik administratif, mendorong pendidikan publik dan program informasi, melakukan penyelidikan atas segala pengaduan tentang pelanggaran yang terjadi, serta melakukan dengan pendapat demi tercapainya pemenuhan hak ekonomi dan sosial diseluruh wilayah negara ataupun paling tidak dibeberapa wilayah prioritas.

Mengupayakan terjaminnya hak untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi dalam artian yang luas, yang meliputi juga pra kondisi yang sosial dan kulturalnya, negara beserta pejabat tidak lagi berperan sebagai *wachtdog* dan *hands off policy*-nya. Negara beserta pejabatnya harus sanggup bertindak positif, untuk secara proaktif mengintervensi proses, sedemikian rupa sehingga situasi kehidupan menjadi cukup kondusif bagi setiap manusia warga negara/ masyarakat untuk dapat mengupayakan hak nya menurut ketentuan konstitusi dan kovenan yang ada.

Kedua, Hak ekonomi, sosial dan budaya tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya, interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini, hak untuk memilih dan kebebasan mengeluarkan pendapat, misalnya tidak akan banyak artinya bagi mereka yang berpendidikan rendah karena pendapatan mereka tidak cukup untuk membiayai sekolah, apalagi bagi masyarakat miskin yang bergantung hidupnya pada sisa-sisa sampah globalisasi. *Ketiga*, Hak ekonomi, sosial, dan budaya mengubah kebutuhan menjadi hak, seperti yang sudah diulas di atas, atas dasar keadilan dan martabat manusia, hak ekonomi, sosial, budaya memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai

hak yang harus diklaim (*rights to claim*) dan bukannya sumbangan yang di dapat (*charity to recieve*).

Pembangunan hukum hak asasi manusia ekonomi, sosial dan budaya kedepan adalah menterjemahkan nilai-nilai Pancasila, imperatif-imperatif konstitusi ke dalam undang-undang organik di satu sisi, serta menjadikan hak ekonomi, sosial dan budaya memiliki kekuatan hukum untuk digugat pemenuhannya. Komite Ecosoc PBB tahun 1998 telah mengeluarkan beberapa komentar umum (*general comment*) yang secara langsung memberikan bahasan terhadap isu status hukum (*justiability*) serta perlunya pengaturan penyelesaian secara hukum atas pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui pengaturan hak asasi manusia yang lebih baik dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Dalam *general comment No.9* tentang penerapan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komite menyanggah pendapat yang menyatakan bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya secara *inheren* tidak cocok untuk diterapkan melalui *law or judicial enforcement*, dan sekaligus mengesahkan suatu standar dimana negara/ pemerintah dipersyaratkan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian hukum dalam dua cara, yaitu: melalui interpretasi yang konsisten dari hukum agar sesuai standar kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khususnya dalam hal kesetaraan dan non diskriminasi, serta melalui pengesahan peraturan yang membentuk mekanisme penyelesaian hukum yang terjadi.

Komite kemudian mengesahkan tiga prinsip dasar pemenuhan berdasarkan kesepakatan tentang tanggungjawab negara untuk menyediakan mekanisme hukum atas pelanggaran Hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu: *pertama*, langkah apapun yang dilakukan suatu negara haruslah cukup untuk

memberikan dampak bagi hak-hak yang tercantum dalam kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khusus untuk memenuhi pengaturan prinsip non-diskriminasi dalam kovenan, maka penerapan aturan hukum tidak bisa dan tidak harus dilakukan; *kedua*, perlindungan atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya harus setara dan menjadi bagian integral dari upaya perlindungan atas hak asasi manusia dalam bidang politik; *Ketiga*, komite mengusulkan agar prinsip-prinsip hak ekonomi, sosial, budaya yang tercantum dalam kovenan, diadopsi dalam sistem hukum nasional, baik melalui ratifikasi maupun absorpsi ke dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, tujuannya agar individu menggunakannya dalam litigasi di pengadilan untuk memperoleh keadilan.

Dalam implementasi pembangunan hukum tentu membutuhkan peranan seluruh pihak bangsa dan negara, jadi tidak hanya menjadi kewenangan atau peranan penuh lembaga negara, tetapi membutuhkan sinergitas antara lembaga negara dengan masyarakat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berperan dalam bidang legislasi harus kemudian menciptakan pembangunan hukum hak asasi manusia dibidang ekonomi, sosial, dan budaya yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pemerintah melaksanakan pemenuhan hak asasi manusia, dan Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pengawasan terhadap jalannya hak asasi manusia. Selain itu misalnya lembaga yang mengawal dan berkontribusi terhadap pembangunan hukum hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan budaya adalah lembaga kekuasaan kehakiman (terutama Mahkamah Konstitusi). Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusionalisme dan lembaga yang memberikan perlindungan hak asasi manusia dari kerugian-kerugian konstitusional

yang diakibatkan oleh lahirnya undang-undang yang melanggar atau bertentangan dengan hak asasi manusia yang berlaku universal dan dijamin oleh Pancasila, contoh konkrit adalah pembatalan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 yang di dalamnya mengandung ketidakpastian hukum.

Intinya bahwa Indonesia sebagai negara hukum demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum menjadikan hukum sebagai *the supreme* (panduan tertinggi), sebagai perwujudan tersebut lembaga-lembaga negara dengan sistem *checks and balances* mampu mengemban pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu juga yang terpenting adalah partisipasi masyarakat secara menyeluruh, pemerintah dan masyarakat harus sinergis dan menjalin kemitraan komprehensif untuk mewujudkan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

C. PENUTUP

Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan budaya sangat kuat, terjadi pergeseran nilai dan norma yang melandasi dan mengatur hak asasi manusia diberbagai negara, namun dengan adanya globalisasi sekat pembatas nilai-nilai tersebut menjadi hilang, ada nilai yang tetap *survive* dan ada nilai-nilai yang kemudian bergeser. Solusi yang tepat adalah melakukan pembangun hukum hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya (HESB) merupakan hak asasi yang harus di lindungi, dihormati dan dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (penyelenggara otonomi daerah).

Pembangunan hukum dapat dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam peraturan perundang-undangan organik, sehingga dapat diimplementasikan secara langsung oleh pemerintah. Selain itu, dalam pembangunan hukum hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial, dan budaya perlu ada mekanisme pemenuhan atau penuntutan hak jika hak ekonomi, sosial dan budaya tidak dipenuhi oleh negara, terkait dengan pemenuhan diperlukan upaya sinergis antar lembaga negara dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum Dan Hukum Milenium Ketiga*, Intrans dan STIH Lumajang, Malang, 2007.
- Anthon F. Susanto, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- , *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Barbara Parker, *Evolution and Revolution from Internasional Business to Globalization*, in Hand Book of Organization Studies, London, 1997.
- Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, Tajidu Press, Yogyakarta, 2004.
- Collin Hines, *A Global Look to the Local, Repleacing Economic Globalization With Democracy Localization*, terj. Roem Topatimasang, Insist Press, Yogyakarta, 2005.

- David M. Trubek, et.al, *Global Restructuring nad The Law: The Internationalization of Legal Fields and the Creation of Transnational Arenas*, University of Wincosin, 1993.
- Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- FX Adjie Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Gunawan Muhammad dan Muamar Romadhan (ed), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo, dan PDIH Universitas Diponegoro, Yogyakarta dan Semarang, 2006.
- Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society: Holigonisme dan Masyarakat Demokrasi*, Pilar Humania, Yogyakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Kenichi Ohmae, *The End of Nation State: The Rise of Regional Economic*, The Free Press, New York, 1995.
- Martin Khor, *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2002.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Muladi (Ed.), *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- M.Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antarnegara*, Alumni, Bandung, 1999
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum "Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan"*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta, 2004
- , *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Saafoedin Bahar, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Jajaran Hankam/ Angkat Bersenjata Republik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham Universitas Islam Indonesia dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Makalah :**
- Adnan Buyung Nasution, "Sejarah Perdebatan HAM Di Indonesia" dalam E. Shobirin Nadj. & Naning Mardiniah (Ed.), *Diseminasi Hak Asasi Manusia, Perspektif dan Aksi*, CESDA-LP3ES, Jakarta, 2000.
- Arief Hidayat, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Nasional*, pada PDIH KPK Undip-Unila, Sabtu 30 Januari 2011
- Kuat Puji Prayitno, *Pancasila Sebagai Bintang Pemandu (Leitstern) Dalam Pembinaan Lembaga dan Pranata Hukum di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 14 No. 3 November 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muladi, "Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia", Jurnal Demokrasi & Hak Asasi Manusia, The Habibie Centre, Jakarta, 2002